

**SKRIPSI**  
**ANALISIS KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**  
**PT. CDS PADA TAHUN PAJAK 2021**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : CHRISTOPHER DARELL**

**NIM : 125190106**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA**  
**MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**  
**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2023**

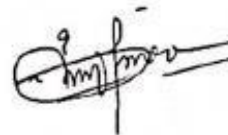
## Persetujuan

Nama : CHRISTOPHER DARELL  
NIM : 125190106  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul : Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. CDS  
Pada Tahun Pajak 2021

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 04-Januari-2023

Pembimbing:  
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,  
M.Si.  
NIK/NIP: 10192048



## Pengesahan

Nama : CHRISTOPHER DARELL  
NIM : 125190106  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul Skripsi : Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. COS Pada Tahun Pajak 2021  
Title : Analysis of Article 21 Obligations on PT. CDS In 2021  
fiscal year

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanegara pada tanggal 17-Januari-2023.

Tim Penguji:

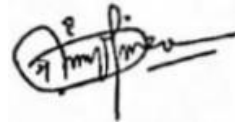
1. SUFIYATI, S.E., M.Si., Ak.
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Ora., M.Si.
3. WIOYASARI, S.E, M.Si., Ak, CPA, CA

Yang bersangkutan dinyatakan: LULUS.

Pembimbing:

PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Ora.,  
M.Si.

NIKJNIP: 10192048



Jakarta, 17-Januari-2023  
Ketua Program Studi



HENORO LUKMA, SE;MM;Akt;CPMA, CA.CPA (Aust.)

## **ABSTRAK**

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak PT. CDS dalam memenuhi kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan pada tahun 2021. PT. CDS bergerak dalam bidang manufaktur produk Garmen untuk disuplai ke beberapa merk dan kantor-kantor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. CDS belum sepenuhnya melakukan kewajiban perhitungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun telah sepenuhnya melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata kunci: Kewajiban Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21

## *ABSTRACT*

*The results of this study aim to identify PT. CDS taxpayer compliance in fulfilling the obligations for calculating, paying, and reporting tax obligations in 2021. PT. CDS is engaged in manufacturing Garment Products to be supplied to several brands and offices. The results of this study indicate that PT. CDS has not fully carried out its calculation obligations in accordance with the applicable law, but has fully carried out its payments and reporting obligations in accordance with the applicable regulations.*

*Keywords: Tax Obligations, Article 21 income tax*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga tugas proposal skripsi penulis yang berjudul “ANALISIS KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PT. CDS PADA TAHUN PAJAK 2021“ dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan sarjana S1 Akuntansi

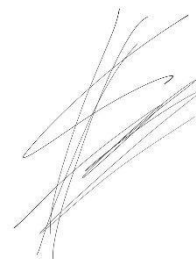
Penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa bantuan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Dra.Purnamawati Helen Widjaja, M.Si., Ak., BKP selaku dosen pengajar sekaligus pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan saran serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Suryani S.E., BKP., M.Si. selaku co-pembimbing yang turut serta membantu memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat dikerjakan dengan lancar dan maksimal.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Akt, CPMA, CA, CPA (Aust). selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah membantu memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa dan motivasi bagi penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi.

7. Pimpinan Kantor PT. CDS dan Manajer Keuangan PT. CDS yang telah bersedia dan mengizinkan penulis untuk menjalankan kegiatan penelitian di perusahaan.
8. Teman-teman dalam grup “Tugas Akhir” yaitu Rama Perdana Hiemawan, Angel Sanada, dan Venny Febriyola yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
9. Teman-teman Akuntansi dan Manajemen angkatan 2019 Universitas Tarumanagara lainnya yang juga menjadi teman seperjuangan.
10. Teman-teman Akuntansi dan Manajemen angkatan 2022 Universitas Tarumanagara yang telah mendukung kelancaran pembuatan skripsi ini.
11. Pihak-pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pembuatan proposal skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam pembuatan skripsi ini. Maka dari itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan diterima agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkannya.

Jakarta, 21 Desember 2022



Christopher Darell

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. PERMASALAHAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah. ....	1
2. Identifikasi Masalah .....	3
3. Batasan Masalah .....	3
4. Rumusan Masalah .....	3
B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II LANDASAN TEORI .....	6
A. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
1. Dasar Perpajakan.....	6
a. Pengertian Pajak.....	6
1) Fungsi Pajak .....	7
a) Fungsi Penerimaan .....	7
b) Fungsi Mengatur .....	7
2) Jenis Pajak .....	7
a) Menurut Golongan.....	7
1.) Pajak Langsung .....	7
2.) Pajak Tidak Langsung.....	8
b) Menurut Sifat .....	8
1.) Pajak Subjektif.....	8
2.) Pajak Objektif.....	8
c) Menurut Pemungutnya .....	8
1.) Pajak Pusat .....	8
1.) Pajak Daerah .....	9
b. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
1) <i>Self Assessment System</i> . ....	9

2) <i>Official Assessment System</i> .....	9
3) <i>Withholding System</i> .....	9
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) .....	10
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
c. Karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
1) Merupakan Pajak Subjektif .....	11
2) Merupakan Pajak Langsung .....	11
3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Termasuk	
Pajak Pusat .....	12
d. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	12
e. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13
f. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	14
g. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan .....	16
1) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang	
Bersifat Tidak Final .....	16
2) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang	
Bersifat Final .....	17
h. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	18
i. Bukan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	18
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	19
a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai	
Tetap .....	19
1) Pengertian Pegawai Tetap.....	19
2) Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	
Untuk Pegawai Tetap .....	19
a) Perhitungan Pajak Penghasilan	
Pasal 21 Masa.....	19
b) Penghasilan yang Harus Dipotong.....	20
c) Rincian Perhitungan.....	21
1.) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	
Atas Penghasilan yang Teratur .....	21
a.) Menghitung Penghasilan Bruto.....	21
b.) Menghitung Penghasilan Neto.....	22
c.) Menghitung Penghasilan Kena	
Pajak .....	22
d.) Menghitung Pajak Penghasilan	
Terutang .....	22
b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai	
Tidak Tetap .....	24
1) Pengertian Pegawai Tidak Tetap.....	24
2) Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	
untuk Pegawai Tidak Tetap .....	24



c.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi bukan Pegawai .....	24
	1) Pengertian Bukan Pegawai.....	24
	2) Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai .....	24
4.	Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 .....	25
a.	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	25
b.	Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	26
B.	KERANGKA PEMIKIRAN .....	27
C.	PENELITIAN TERDAHULU .....	28
BAB III	METODE PENELITIAN .....	30
A.	DESAIN PENELITIAN .....	30
B.	JENIS DATA .....	30
1.	Data Kualitatif .....	30
2.	Data Kuantitatif .....	30
C.	SUMBER DATA .....	31
1.	Data Primer .....	31
2.	Data Sekunder .....	31
D.	LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN .....	31
E.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	31
1.	Dokumentasi .....	32
2.	Wawancara .....	32
3.	Penelitian Kepustakaan .....	32
F.	TEKNIK ANALISIS DATA .....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN .....	34
A.	GAMBARAN PERUSAHAAN .....	34
1.	Deskripsi PT. CDS .....	34
2.	Visi dan Misi PT. CDS .....	34
3.	Struktur Organisasi Perusahaan .....	35
4.	Sistem Penggajian dan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 PT. CDS .....	36
B.	ANALISIS HASIL PENELITIAN .....	36
1.	Analisis Perhitungan PPh 21 Staff PT. CDS Pada Tahun 2021 ...	36
a.	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap A .....	37
1)	Perhitungan atas gaji Pegawai Tetap A Masa Januari .....	38
2)	Perhitungan PPh Pegawai Tetap A Masa Februari sampai November .....	39
3)	Perhitungan PPh Pegawai Tetap A Masa Desember .....	40

b.	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap B .....	41
1)	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap B masa Januari .....	42
2)	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap B Masa Februari .....	43
3)	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap B Masa Maret .....	44
4)	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap B Masa September .....	45
5)	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap B Masa Oktober .....	46
6)	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap B Masa November Dan Desember .....	47
7)	Perbandingan Hasil Perhitungan Penghasilan Pegawai Tetap B .....	49
c.	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap C .....	50
1)	Analisis PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap C Masa Januari .....	51
2)	Analisis PPh Pasal 21 Penghasilan Pegawai Tetap C Masa Februari .....	52
3)	Analisis PPh Pasal 21 Penghasilan Pegawai Tetap C Masa Mei .....	53
4)	Perbandingan Hasil Perhitungan Penghasilan Pegawai Tetap C .....	54
d.	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap D.....	55
1)	Analisis PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap D .....	56
2)	Analisis PPh Pasal 21 atas penghasilan Masa Mei .....	57
e.	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap E.....	58
1)	Analisis PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Masa Januari.....	59
2)	Analisis PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Masa Februari .....	60
3)	Analisis PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Masa Mei.....	59
4)	Analisis PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Masa September .....	62
5)	Perbandingan Hasil Perhitungan Penghasilan Pegawai Tetap E.....	63
2.	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Harian PT. CDS.....	64
a.	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Harian A1 .....	65
1)	Analisis PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari .....	66
2)	Analisis PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari .....	68

3) Analisis PPh Pasal 21 Masa Pajak Mei .....	68
4) Perbandingan hasil Perhitungan penghasilan Pegawai Harian A1 .....	70
b. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Harian B1.....	71
1) Analisis Perhitungan Penghasilan Pegawai Harian B1 .....	72
3. Analisis Waktu Penyetoran PPh Pasal 21 PT. CDS Pada Tahun 2021 .....	73
4. Analisis Waktu Pelaporan PPh Pasal 21 PT. CDS Pada Tahun 2021.....	74
BAB V PENUTUP .....	77
A. KESIMPULAN .....	77
B. KETERBATASAN DAN SARAN.....	77
1. Keterbatasan .....	77
2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83
HASIL UJI TURNITIN .....	84
SURAT PERNYATAAN.....	85

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tabel tarif pasal 17 UU PPh sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ./2016 .....	23
Tabel 2.2 Tabel Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021 .....	23
Tabel 4.1.1 Penghasilan Pegawai Tetap (Dalam Rp) .....	37
Tabel 4.1.2 Tabel Penghasilan Pegawai Tetap A Tahun 2021 .....	37
Tabel 4.1.3 Tabel Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap A masa Januari 2021 .....	38
Tabel 4.1.4 Tabel Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap A masa Februari-November .....	39
Tabel 4.1.5 Tabel Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap A Masa Pajak Desember .....	40
Tabel 4.1.6 Tabel Penghasilan Pegawai Tetap B.....	41
Tabel 4.1.7 Tabel Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap B masa Januari .....	42
Tabel 4.1.8 Tabel Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap B masa Februari.....	43
Tabel 4.1.9 Tabel Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap B masa Maret.....	44
Tabel 4.1.10 Tabel Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap B masa September .....	46
Tabel 4.1.11 Tabel Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap B masa Oktober .....	47
Tabel 4.1.12 Tabel Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap B masa November dan Desember.....	48
Tabel 4.1.13 Tabel perbandingan perhitungan perusahaan dengan hasil analisis Penghasilan Neto Pegawai Tetap B selama Tahun 2021.....	49
Tabel 4.1.14 Tabel Penghasilan Pegawai Tetap C selama Tahun 2021 .....	50

Tabel 4.1.15 Analisis Perhitungan Penghasilan Pegawai Tetap C masa Januari.....	51
Tabel 4.1.16 Tabel Analisis Perhitungan PPh masa Februari.....	52
Tabel 4.1.17 Tabel perhitungan Penghasilan Pegawai tetap C Bulan Mei 2021 .....	53
Tabel 4.1.18 Tabel perbandingan perhitungan perusahaan dengan hasil analisis Penghasilan Pegawai Tetap C .....	54
Tabel 4.1.19 Tabel penghasilan Pegawai Tetap D selama setahun .....	55
Tabel 4.1.20 Tabel perhitungan penghasilan teratur Pegawai Tetap D .....	56
Tabel 4.1.21 Tabel penghasilan Pegawai tetap D bulan Mei .....	57
Tabel 4.1.22 Penghasilan Pegawai Tetap E selama Tahun 2021 .....	58
Tabel 4.1.23 Analisis perhitungan PPh 21 Pegawai tetap E masa Januari .....	59
Tabel 4.1.24 Analisis perhitungan PPh 21 Pegawai tetap E masa Februari .....	60
Tabel 4.1.25 Analisis perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap E masa Mei .....	61
Tabel 4.1.26 Analisis Perhitungan PPh 21 untuk penghasilan Pegawai Tetap E untuk masa September .....	62
Tabel 4.1.27 Tabel perbandingan perhitungan perusahaan dengan hasil analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Tetap E.....	64
Tabel 4.2.1 Penghasilan pegawai dengan upah harian .....	65
Tabel 4.2.2 Tabel Penghasilan Pegawai Harian A1 selama Tahun 2021 .....	66
Tabel 4.2.3 Tabel Analisis Perhitungan PPh 21 Pegawai Harian A1 masa Januari.....	67
Tabel 4.2.4 Tabel Analisis Perhitungan PPh 21 Pegawai Harian A1 masa Februari .....	68
Tabel 4.2.5 Tabel Analisis Perhitungan PPh 21 Pegawai Harian A1 masa Mei 2021 .....	69

Tabel 4.2.6 Tabel Perbandingan perhitungan perusahaan dengan analisis perhitungan penghasilan Pegawai Harian A1 selama tahun 2021 .....	70
Tabel 4.2.7 Tabel Penghasilan Pegawai Harian B1 selama 1 Tahun .....	71
Tabel 4.2.8 Tabel Analisis Perhitungan Penghasilan Pegawai Harian B1 .....	72
Tabel 4.2.9 Tabel Perbandingan Perhitungan Penghasilan Pegawai Harian B1 Tahun 2021.....	73
Tabel 4.3.1 Tabel analisis penyeteroran PT CDS Tahun 2021 .....	74
Tabel 4.4.1 Tabel analisis pelaporan SPT Masa PPh 21 PT CDS Tahun 2021 .....	75

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	26
-------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kunjungan Ke Pabrik PT. CDS .....	81
Lampiran 2 Gambar Pabrik PT. CDS .....	82



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PERMASALAHAN**

##### **1. Latar Belakang Masalah**

Negara dapat dilihat sebagai suatu organisasi yang memiliki kedaulatan kuat. Negara secara hakikatnya adalah suatu persekutuan hukum yang memiliki wilayah dan masyarakatnya tinggal di dalamnya dan saling mengurus kepentingan bersama. Dengan demikian, Negara dapat diartikan sebagai organisasi yang dimana ada masyarakat di dalamnya yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu negara.

Masyarakat dalam suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang patut dipenuhi. Hak dari masyarakat termasuk hak untuk mendapatkan kepastian, perlindungan hukum yang adil dari negara, juga mendapat kesamaan perlakuan di mata hukum. Di satu sisi, rakyat memiliki kewajiban yaitu menaati hukum dan undang-undang yang berlaku, juga membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Menurut Andriani (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan definisi tersebut, pajak memiliki sifat memaksa artinya ketentuan dalam perpajakan berlaku seperti hukum dan undang-undang lainnya. Negara berhak melakukan penagihan kepada setiap wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajak dengan menggunakan surat pemeriksaan hingga kekerasan. Negara juga dapat memberikan sanksi bagi setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan dan tata cara perpajakan

dengan menggunakan sanksi administratif hingga sanksi pidana penjara atas tiap kekeliruan maupun kesengajaan.

Dari hal tersebut, terdapat keharusan bagi wajib pajak untuk memahami ketentuan umum perpajakan yang berlaku, beserta dengan aturan-aturan yang mendukungnya. Sistem *self assessment* menjadi salah satu yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. *Self assessment system* merupakan sistem pelaksanaan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak menghitung, melaporkan, membayar dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban wajib pajak secara mandiri.

Salah satu contoh dari penerapan dari *self assessment system* itu sendiri adalah *withholding system*. *Withholding system* adalah sistem pemotongan pajak melalui pihak ketiga yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang telah diberikan kepada penerima penghasilan dan menyerahkannya kepada negara. beberapa jenis pajak yang menggunakan *withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pelaku usaha berkembang pesat di Indonesia. terdapat beberapa aturan dan ketentuan baru terkait kewajiban pajak. Menteri Keuangan mengemukakan adanya reformasi perpajakan di Indonesia. Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan menerbitkan atau mengubah undang-undang guna mendorong penerimaan negara dari pajak yang lebih tinggi kedepannya.

Sejalan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Dengan berbagai pemilihan kriteria dan pertimbangan yang telah penulis jalankan, maka PT. CDS Akan

menjadi badan atau perusahaan yang diteliti dan judul dari skripsi ini adalah “ANALISIS KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PT. CDS PADA TAHUN PAJAK 2021”.

## **2. Identifikasi Masalah**

Masalah yang dapat terjadi berkaitan dengan perhitungan, penyetoran, dan pembayaran kewajiban PPh Pasal 21 PT. CDS adalah :

- a. Kesalahan dalam identifikasi penambah/pengurang penghasilan
- b. Kesalahan dalam perhitungan Tarif PPh Pasal 17 UU PPh
- c. Ambiguitas dalam penggunaan tarif dan pasal PPh yang digunakan
- d. Kekeliruan dalam perhitungan kasus tertentu seperti pindah kerja, naik gaji, dan mutasi karyawan.

## **3. Batasan Masalah**

Guna membahas lebih dalam mengenai penerapan nyata *withholding system* dan *self-assessment* dalam perpajakan, juga untuk menghindari ketidakjelasan objek penelitian, Ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti kali ini dibatasi pada PPh Pasal 21.

## **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah perhitungan PPh Pasal 21 ada pegawai PT. CDS secara keseluruhan sudah dilakukan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008?
- b. Apakah penggunaan tarif Pasal 17 UU PPh dalam menghitung PPh Pasal 21 PT. CDS pada tahun 2021 sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016?

- c. Apakah penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 masa selama tahun 2021 dilakukan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 242/PMK.03/2014?

## **B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. CDS kepada pegawainya sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- b. Untuk menganalisis ketepatan PT. CDS dalam menggunakan Tarif Pasal 17 UU PPh sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
- c. Untuk menganalisis ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT. CDS selama tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 242/PMK.03/2014.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak:

- a. Bagi Peneliti  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai aplikasi nyata dan berbagai fenomena praktik perpajakan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
- b. Bagi Perusahaan  
Selain itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi perusahaan yang diteliti agar melaksanakan kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan lebih

optimal kedepannya guna menghindari kekeliruan dan kesalahan.

c. Bagi Pembaca

Merupakan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak lain yang juga berperan sebagai pemotong PPh Pasal 21 agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggreni, N. M. T., & Noviani, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit XYZ. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(1), 39-56.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Desi, D., & Sagala, E. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2).
- Sari, D. (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jawa Barat: Mitra Wacana Media
- Fanuel, H. (2020). *Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT Tri Cipta Gemilang* (Doctoral dissertation, Prodi Akuntansi).
- Isma, S. M., Utomo, R. P., & Subhan, M. (2017). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Karyawan Yayasan Mesjid Raya Darussalam. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 2(2).
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057-1068.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Naat, A. Z., Maedina, R., & Hasti, A. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Alfa Global Indonesia Di Gowa. *Accounting Journal*, 1(1), 233-241.
- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit X di Klaten-Jawa Tengah. *Review of Applied Accounting Research*, 1(2), 84-92.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.

Peraturan Menteri Keuangan No. 252/KMK.03/2008 Tentang *Pemotong Pajak. Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*

Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang *Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.*

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 mengenai *Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak.*

Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 Tentang *Surat Pemberitahuan (SPT)*

Peraturan Pemerintah No. 68/2009 Tentang *Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*

Rahma, E. O., & Purnamawati Helen Widjaja, N. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 Dan PPh 4 Ayat 2 Pada PT TAC Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258-1265.

Resmi, S. (2017) *Perpajakan Teori Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2020). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan PPh 21 Atas Dosen Tetap Pada Politeknik Pos Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 40-52.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Sukardji, U. (2017). *Pajak Pertambahan Nilai*. Depok: RajaGrafindo Persada.

UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

